

UPDATE EKONOMI ASIA TIMUR DAN PASIFIK, APRIL 2022

Menerjang Badai

Ringkasan

Persis setelah kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) berulang kali menghadapi badai COVID-19, tiga “awan” kini menyelubungi cakrawala ekonomi yang akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

- Yang terbaru, gejala yang berasal dari perang di Ukraina mengganggu pasokan komoditas, meningkatkan tekanan keuangan, dan menghambat pertumbuhan global.
- Perang ini terjadi tidak hanya di tengah pandemi, tetapi juga saat terjadinya dua perkembangan lainnya:
 - Inflasi di Amerika Serikat (AS) yang didorong oleh pemulihan ekonomi karena pemberian stimulus dan masih berlangsungnya gangguan pasokan dapat menimbulkan pengetatan keuangan yang lebih cepat dari yang diperkirakan, mungkin tepat waktunya bagi AS tetapi terlalu dini bagi banyak negara EAP yang belum pulih sepenuhnya.
 - Perlambatan struktural di Tiongkok, disertai kebijakan terhadap sektor properti yang mempunyai terlalu banyak utang (*deleveraging*), dan kenaikan kasus COVID-19 di tengah upaya melenyapkan COVID dapat melemahkan ekspor regional.

Selain risiko-risiko tersebut, ada pula tiga peluang:

- **Perubahan lanskap perdagangan** akan menciptakan peluang ekspor baru: di sektor manufaktur, bagi negara-negara EAP lain ketika sebagian proses produksi pindah dari Tiongkok; di sektor jasa, ketika pengiriman secara digital (*digital delivery*) membuat semakin banyak tugas dapat diperdagangkan.
- **Penyebaran teknologi digital** dapat meningkatkan produktivitas, bukan hanya di beberapa negara dan perusahaan-perusahaan *frontier* (perusahaan yang bisa menerapkan teknologi baru lebih cepat dibandingkan di masa lalu), tetapi juga di banyak negara dan perusahaan yang tidak efisien.
- **Peningkatan viabilitas teknologi ramah lingkungan** memungkinkan negara-negara EAP mengurangi emisi karbon mereka dan mengatasi masalah kerawanan energi baru tanpa adanya penurunan konsumsi atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Untuk memitigasi risiko-risiko dan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, negara-negara harus melakukan empat langkah:

- **Peningkatan efisiensi kebijakan fiskal** untuk pemulihan dan pertumbuhan. Dukungan yang lebih efisien dan tepat sasaran kepada rumah tangga dan dunia usaha dapat mengurangi penderitaan akibat dari kumulatif gejala ekonomi dan menciptakan ruang investasi di sektor infrastruktur perdagangan, energi dan penyebaran teknologi. Kebijakan fiskal ekspansif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidak boleh melemahkan viabilitas keuangan mereka. Komitmen terhadap aturan fiskal (*fiscal rules*) dan reformasi anggaran di masa mendatang akan membantu merekonsiliasi kebutuhan belanja dengan makin ketatnya keterbatasan anggaran di tengah peningkatan utang.
- **Penguatan kebijakan makroprudensial** untuk memitigasi risiko-risiko dari pengetatan keuangan global. Kebijakan moneter harus tetap waspada terhadap tekanan inflasi, tetapi saat ini masih dapat tetap mendukung pemulihan karena suku bunga riil relatif tinggi sedangkan tingkat inflasi inti (*core inflation*) relatif rendah. Diagnosis uji tekanan (*stress-testing diagnostics*) dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi kerentanan

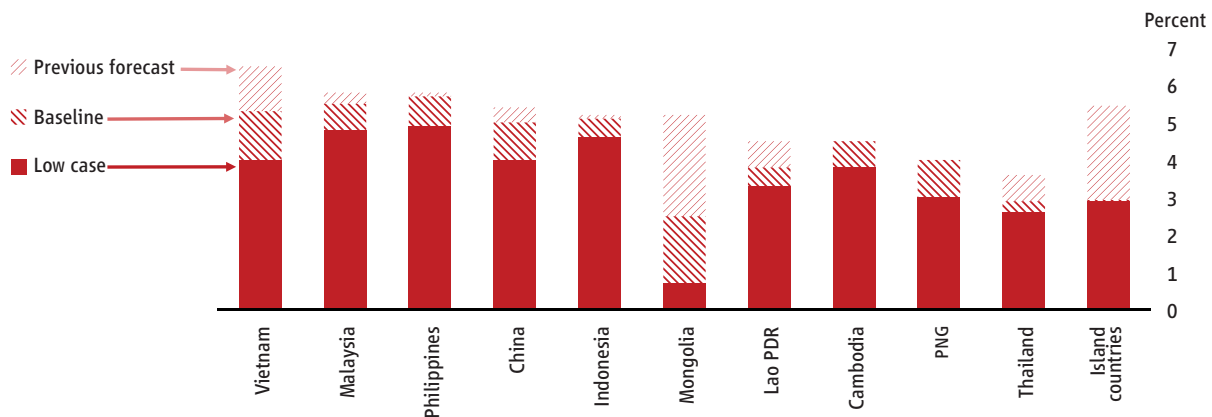
yang mungkin dapat memburuk di balik relaksasi beberapa regulasi dan penjaminan secara implisit (*implicit guarantees*). Maka, tindakan-tindakan perlu dilakukan untuk mengkapitalisasi bank-bank, melindungi nilai utang (*hedge*) dan memperpanjang jatuh tempo utang, serta meningkatkan penyangga likuiditas.

- **Reformasi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan** barang dan, terutama, jasa yang masih dilindungi di EAP untuk memanfaatkan perubahan lanskap perdagangan global. Selain itu, dengan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja domestik serta masuk dan keluarnya perusahaan-perusahaan dari pasar, realokasi sumber daya akan dapat dilakukan dalam merespons gejolak global. Tidak melakukan pembatasan ekspor nasional dalam menghadapi kenaikan harga global dapat membantu mencegah terjadinya hal yang lebih buruk. Partisipasi dalam perjanjian perdagangan secara mendalam (*deep trade agreements*) dapat mengakselerasi reformasi di dalam negeri dan menjamin akses ke pasar luar negeri.
- **Reformasi kebijakan dan pendampingan untuk penyebaran teknologi.** Meningkatnya persaingan di tingkat domestik dan internasional dapat memperkuat insentif untuk penerapan teknologi yang bisa mendorong produktivitas. Peningkatan keterampilan manajerial dan teknis serta perbaikan akses keuangan, disertai dengan infrastruktur digital dapat meningkatkan kapasitas untuk penerapan teknologi. Penghapusan distorsi domestik, seperti distorsi yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar fosil dan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dapat mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan (teknologi hijau).

Gambaran Umum

Pada awal tahun 2022, negara-negara EAP tampak melanjutkan pemulihan ekonomi mereka. Kawasan EAP berhasil mengatasi gelombang Delta yang sulit, dan terdampak relatif tidak parah oleh gelombang Omicron. Perdagangan luar negeri dan kondisi keuangan tetap terkendali, dan banyak negara sedang mempertimbangkan untuk melakukan konsolidasi fiskal. Sejak saat itu, percepatan laju inflasi di Amerika Serikat telah memicu pengetatan keuangan lebih awal dari yang diperkirakan, Tiongkok mengalami lonjakan infeksi COVID-19 dan masih berlangsungnya tekanan terhadap sektor properti dengan tingkat utang yang tinggi, dan Rusia menginvasi Ukraina. Meskipun beberapa negara dengan perekonomian besar mungkin bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih baik, dampak dari hal-hal tersebut akan menurunkan prospek pertumbuhan di sebagian besar kawasan EAP. Oleh karena itu, proyeksi pertumbuhan regional pada tahun 2022 telah berkurang, dari 5,4 persen dalam laporan Update sebelumnya menjadi 5,0 persen. Pada skenario buruk (*low-case scenario*), jika kondisi global memburuk dan kebijakan nasional dalam merespon hal tersebut kurang solid, angka pertumbuhan bisa melambat ke 4,0 persen (gambar O.1). Akan tetapi, gejolak yang terjadi hendaknya tidak menutup peluang-peluang baru terciptanya pertumbuhan melalui perdagangan dan inovasi. Reformasi yang signifikan dalam hal kebijakan fiskal, makroprudensial, perdagangan dan inovasi dapat membantu negara-negara EAP untuk menghindari banyak risiko dan memanfaatkan sedikit peluang yang ada.

Gambar O.1. Prediksi pertumbuhan tahun 2022



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia.
Catatan: Pertumbuhan PDB (persen) pada harga pasar.

Latar belakang

Setelah gelombang Delta mereda pada Triwulan 3 tahun 2021, Sebagian besar Kawasan EAP melanjutkan pemulihan ekonomi di Triwulan ke-4 tahun 2021 hingga Triwulan 1 tahun 2022, meskipun muncul gelombang Omicron. Negara-negara di kawasan EAP mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2 persen dan diproyeksikan akan tumbuh 5 persen pada tahun 2022 (gambar O.1). Akan tetapi, pemulihan masih belum merata di berbagai negara dan sektor. Tiongkok, Indonesia dan Vietnam telah berhasil melampaui level output pra-pandemi sedangkan Kamboja, Malaysia, Mongolia, Filipina dan Thailand diperkirakan baru bisa melakukannya pada tahun 2022 ini. Namun output di beberapa negara Kepulauan Pasifik yang terkena dampak pandemi paling parah kemungkinan belum bisa kembali ke level pra-pandemi bahkan pada tahun 2023. Meskipun sektor-sektor seperti pertanian, keuangan, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah pulih dengan cepat, output di sektor transportasi, akomodasi dan makanan-minuman masih jauh di bawah level pra-pandemi. Pada tahun 2021, angka kemiskinan tidak mengalami penurunan di seluruh negara EAP kecuali Tiongkok, tapi di tahun 2022, sebanyak 30 juta orang diproyeksikan akan keluar dari kemiskinan, relative terhadap garis kemiskinan untuk negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income class/UMIC*): US\$5,50/hari (menggunakan *purchasing power parity/PPP* 2011).

Mengapa?

Kinerja ekonomi negara-negara dipengaruhi oleh seberapa efisien mereka mengendalikan guncangan COVID-19, bagaimana mereka dipengaruhi oleh perubahan kondisi negara-negara lain di dunia dan seberapa besar dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Bencana alam, terutama erupsi gunung berapi, yang berdampak bagi Tonga, dan faktor-faktor tak terduga lainnya, seperti kerusakan di Kepulauan Solomon, juga turut berperan.

Gejolak COVID dan strategi pengendaliannya

Berkat adanya peningkatan imunitas tubuh setelah pemberian vaksinasi terhadap infeksi varian Delta, kebanyakan negara di kawasan EAP kini menjadi tidak terlalu rentan terhadap lonjakan infeksi baru dari varian Omicron. Oleh karena itu, pemerintah dapat melonggarkan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi beberapa negara seperti di Kepulauan Pasifik, belum mencapai puncak gelombang Omicron. Tiongkok baru-baru ini juga mengalami lonjakan kasus sehingga pemerintahnya menerapkan *lockdown* ketat. Varian Delta pada 2021 menimbulkan kerugian manusia yang jauh lebih besar di kawasan EAP dibandingkan dengan gelombang pertama COVID-19 pada awal tahun 2020. Tetapi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh varian Delta lebih kecil daripada gelombang sebelumnya. Meskipun demikian, di berbagai negara, kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan virus tersebut masih tetap menghambat konsumsi domestik, investasi swasta dan pariwisata internasional.

Perdagangan

Karena tingkat permintaan di kawasan-kawasan lain di dunia masih cenderung meningkat meskipun adanya lonjakan Omicron dan kendala-kendala logistik mulai berkurang, maka perdagangan dapat terus bertumbuh. Kekhawatiran terhadap kejenuhan permintaan global untuk barang-barang elektronik konsumen yang menjadi produk-produk ekspor yang penting bagi negara-negara seperti Tiongkok, Malaysia dan Vietnam, ternyata tidak terjadi. Namun, berdasarkan data yang masuk, pertumbuhan perdagangan global mengalami perlambatan pada tahun 2022. Meskipun perdagangan jasa digital yang menjadi unggulan dari negara-negara seperti Tiongkok dan Filipina masih tetap kuat, sector pariwisata yang vital bagi beberapa negara di Kepulauan Pasifik, Kamboja, Filipina dan Thailand, mengalami pemulihan yang jauh lebih lambat.

Dukungan ekonomi makro

Pengetatan anggaran antarwaktu yang semakin ketat, disertai dengan kebutuhan yang semakin berkurang, telah menyebabkan penurunan dukungan fiskal dari rata-rata 6 persen pada tahun 2020 menjadi 5 persen pada 2021. Penurunan lebih lanjut menjadi 1,5 persen dari PDB secara rata-rata diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2022 meskipun Tiongkok diproyeksikan akan melonggarkan kebijakannya secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan. Pada tahun 2021, inflasi harga konsumen rata-rata masih berada dalam rentang target bank sentral di semua negara utama, sehingga bank sentral dapat mempertahankan sikap kebijakan moneter yang akomodatif selama tahun tersebut.

Risiko baru terhadap pertumbuhan: Tiga perkembangan internasional

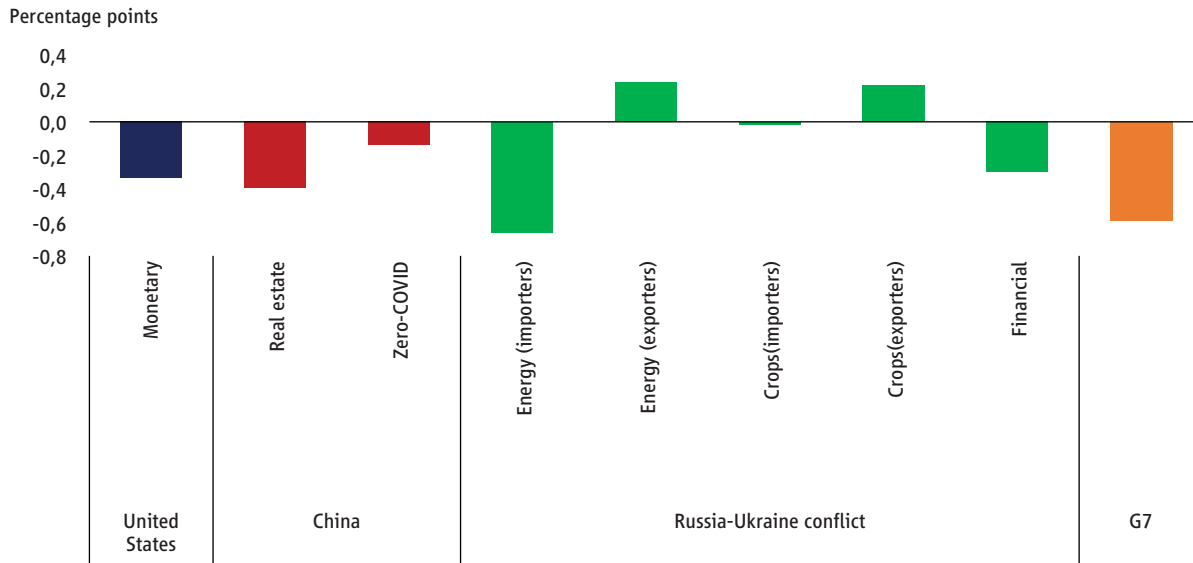
Sektor eksternal negara-negara EAP saat ini dipengaruhi oleh: i) Pengetatan sektor keuangan, khususnya di Amerika Serikat, ii) perubahan pertumbuhan dan komposisi aktivitas ekonomi, khususnya di Tiongkok, dan iii) perang di Ukraina.

Pemulihan ekonomi yang cepat karena pemberian stimulus di Amerika Serikat telah menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, pengetatan moneter yang lebih dini bahkan dapat mempersulit pemulihan di negara-negara lain. Kondisi keuangan di AS sangat penting bagi negara-negara berkembang di kawasan EAP, khususnya negara-negara seperti Malaysia yang lebih mengandalkan arus modal jangka pendek. Risiko arus modal keluar, yang dapat memberikan tekanan pada mata uang dari negara-negara tersebut, dapat memicu pengetatan keuangan secara prematur. Gejala kebijakan moneter di AS yang diasumsikan akan menaikkan suku bunga setidaknya sebesar 25 basis poin, kemungkinan akan mengganggu pertumbuhan di negara-negara berkembang di kawasan EAP, mulai dari -0,4 poin persentase di Malaysia hingga -0,7 poin persentase di Thailand (gambar O.2).

Pertumbuhan diperkirakan akan melambat baik di Tiongkok sebagai akibat dari perlambatan struktural dan perubahan rezim regulasi, maupun di AS sebagai akibat dari perlambatan siklus. Oleh karena itu, kedua pertumbuhan tersebut diperkirakan akan memberikan kontribusi yang lebih kecil kepada pertumbuhan global pada tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 – tahun di mana output kembali meningkat (*rebound*) dari kontraksi COVID. Akan tetapi, ukuran absolut kontribusi Tiongkok dan AS untuk pertumbuhan diperkirakan akan mempunyai dampak yang sedikit lebih besar (0,4 poin persentase) atas kawasan EAP daripada perlambatan pertumbuhan Tiongkok yang sebanding (0,3 poin persentase).

Guncangan-guncangan tertentu terhadap aktivitas ekonomi di Tiongkok kemungkinan akan mempengaruhi negara-negara EAP yang perdagangannya semakin berorientasi pada pasar Tiongkok. Sektor tujuan yang signifikan bagi nilai tambah EAP menghadapi beberapa kendala seperti: i) sektor konstruksi yang terkendala oleh upaya untuk mengurangi penggunaan dana pinjaman, ii) sektor industri yang terkendala oleh upaya yang berpotensi untuk mengurangi emisi, dan iii) sektor jasa yang terkendala oleh upaya untuk mengendalikan COVID-19 dan penyedia monopolistik. Kontraksi di sektor properti (*real estate*), yang diasumsikan sebanding dengan proyeksi penurunan pertumbuhan investasi residensial sebesar 10 poin persentase dari tahun 2020 sampai 2022, dapat mengurangi pertumbuhan di kawasan EAP sebesar 0,3 poin persentase pada tahun 2022. Kebijakan *zero-COVID* Tiongkok yang diasumsikan setara dengan dampak guncangan Delta terhadap konsumsi di Tiongkok untuk satu triwulan saja tahun 2022, dapat mengurangi pertumbuhan EAP sebesar 0,14 poin persentase.

Gambar O.2. Estimasi dampak perkembangan internasional terhadap pertumbuhan negara-negara EAP



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia

Catatan: Diagram ini secara kasar menggambarkan dampak dari alternatif guncangan-guncangan secara hipotesis. Asumsi-asumsi tertentu yang mendasari setiap guncangan disajikan dalam teks. Dampak dari guncangan moneter AS diestimasi dengan menggunakan metodologi sign-restricted structural VAR. Sektor properti dan kebijakan zero-COVID Tiongkok serta guncangan-guncangan keuangan global akibat perang di Ukraina dimodelkan dan diestimasi dengan menggunakan Model Ekonomi Oxford. Guncangan-guncangan di sektor energi dan tanaman pangan akibat perang di Ukraina dimodelkan dan diestimasi dengan menggunakan model keseimbangan umum yang dikomputasi dari GTAP. Guncangan-guncangan G7 diestimasi dengan menggunakan metodologi structural VAR.

Guncangan-guncangan yang berasal dari perang di Ukraina serta sanksi-sanksi terkait dapat memberikan pengaruh yang paling konkret terhadap kawasan EAP berupa gangguan pasokan komoditas maupun peningkatan tekanan pada sector keuangan serta penurunan kepercayaan global. Ketergantungan langsung kawasan EAP pada Rusia dan Ukraina melalui impor dan ekspor barang, jasa dan modal memang masih terbatas. Tetapi, perang dan sanksi-sanksinya kemungkinan akan menaikkan harga pangan dan bahan bakar di skala internasional sehingga merugikan konsumen dan pertumbuhan. Jumlah penduduk miskin di Filipina, misalnya, dapat meningkat sebanyak 1 poin persentase atau 1,1 juta jiwa, diukur menurut garis kemiskinan untuk golongan negara berpenghasilan menengah ke bawah (\$3,2/hari), jika harga sereal naik sebesar rata-rata 10 persen selama tahun bersangkutan. Pendapatan riil nasional importer komoditas seperti Kamboja dan Thailand dapat berkurang sebanyak 0,7 poin persentase jika harga bahan bakar naik sebesar rata-rata 10 persen selama tahun bersangkutan. Selanjutnya, dengan meningkatnya tekanan inflasi global, dampak lanjutan (*knock-on effects*) dari perang ini mungkin akan berkepanjangan dan dapat merubah ekspektasi inflasi.

Ketiga guncangan tersebut bisa menyebabkan efek penyeimbangan (*offsetting*) maupun efek penguatan (*reinforcing*). Di satu pihak, guncangan keuangan akibat perang di Ukraina dapat menyebabkan pengetatan kebijakan moneter AS yang lebih lambat daripada yang direncanakan meskipun tekanan inflasi lebih kuat. Demikian pula, kenaikan harga-harga komoditas akibat perang tersebut dapat mengimbangi penurunan harga-harga akibat kontraksi sektor property di Tiongkok meskipun komoditas yang terdampak mungkin tidak sama. Di lain pihak, setiap guncangan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan global karena guncangan tersebut menghambat kegiatan ekonomi di negara-negara yang terdampak secara langsung maupun secara tidak langsung di negara-negara lain di dunia. Perlambatan pertumbuhan negara-negara G7 sebesar 0,9 persen dapat menyebabkan pelemahan permintaan ekspor bagi negara-negara EAP dan, dengan demikian, turunya pertumbuhan rata-rata sebesar 0,6 persen.

Guncangan-guncangan tersebut kemungkinan akan menambah tantangan-tantangan pasca-COVID. Perusahaan-perusahaan regional yang mengalami kesulitan, di mana lebih dari setengahnya mencatat melakukan penundaan

pembayaran (*payment arrears*) pada 2021, akan mengalami guncangan penawaran dan permintaan yang baru. Sektor rumah tangga, di mana 8 juta di antaranya kembali jatuh miskin selama pandemi, akan mengalami penyusutan penghasilan riil yang bahkan semakin parah akibat lonjakan harga-harga. Kesulitan di tingkat ekonomi mikro harus bersaing dengan kesulitan dan tantangan di tingkat ekonomi makro. Pemerintah yang utang per PDBnya naik sebesar 10 poin persentase sejak tahun 2019, akan berjuang keras untuk memberikan dukungan ekonomi. Pengetatan kebijakan sektor keuangan dan peningkatan inflasi, sedikitnya satu poin persentase di atas ekspektasi sebelumnya akibat guncangan harga minyak saja, akan mempersempit ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter. Lebih lanjut lagi, bank-bank yang mengambil risiko terlalu besar (*overexposed banks*), dengan nilai kredit per PDB sekitar 10 persen lebih tinggi daripada sebelum pandemi, harus menghadapi tekanan keuangan yang baru dan peningkatan risiko pinjaman.

Namun demikian, beberapa negara di kawasan EAP masih lebih tangguh dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi guncangan karena memiliki sejarah sifat kehati-hatian. Negara-negara pengekspor komoditas, seperti Indonesia dan Malaysia, dapat meredam kenaikan harga internasional dengan lebih mudah daripada negara-negara pengimpor komoditas, seperti Fiji dan Thailand. Negara-negara yang melakukan pengendalian kebijakan fiskal dan moneter sejak tahap awal pandemi mempunyai ruang kebijakan untuk meredam guncangan. Misalnya, Tiongkok menurunkan cadangan fiskal strukturalnya sebanyak 2,6 poin persentase dari PDB pada tahun 2021 agar dapat merencanakan peningkatan 2,8 persen pada tahun 2022 untuk memenuhi target pertumbuhannya. Sebaliknya, Mongolia dengan utang pemerintah yang mencapai hampir 80 persen dari PDB dan inflasi tahunan di atas 14 persen, mempunyai sedikit ruang untuk meredam dampak negatif. Tetapi semua negara di kawasan EAP, karena keterbukaan mereka dalam perdagangan dan keuangan, menghadapi risiko ekonomi yang serius jika kondisi global memburuk secara signifikan. Pertumbuhan regional tahun 2022 dapat menurun dari 5,4 persen yang diproyeksikan dalam laporan Update Oktober 2021 menjadi 5 persen dalam skenario baseline saat ini dan menjadi 4,40 persen dalam skenario terburuk.

Peluang pertumbuhan baru: Perdagangan, teknologi digital dan produksi yang ramah lingkungan

Insentif untuk melakukan diversifikasi produksi dan impor yang memang sudah kuat karena keengganan untuk bergantung pada pihak lain setelah munculnya COVID-19 ini akan diperbesar oleh perang yang ada sekarang dan sanksi-sanksinya. Insentif untuk merelokasi produksi semakin menguat akibat kenaikan upah riil di Tiongkok yang dipicu oleh pertumbuhan dan perubahan demografis, dan ketegangan perdagangan Tiongkok-AS. Persentase negara-negara EAP selain Tiongkok yang mengimpor barang jadi (*final goods*) dari AS meningkat dari 10 persen pada awal tahun 2018 menjadi 14 persen pada pertengahan tahun 2021 sebelum terjadi guncangan Delta sedangkan pangsa pasar Tiongkok turun selama periode yang sama dari 33 persen menjadi 25 persen. Namun, ruang lingkup otomatisasi yang semakin luas mempersempit peluang negara-negara lain untuk terlibat dalam rantai nilai global (GVC) yang melakukan spesialisasi tugas-tugas yang bersifat padat karya. Sejauh mana setiap negara dapat mengambil manfaat dari rekonfigurasi rantai nilai ini bergantung pada biaya produksi dan perdagangan mereka. Tetapi keunggulan negara-negara berkembang di kawasan EAP dari segi biaya tenaga kerja yang rendah diimbangi, pada taraf yang berbeda-beda, dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Teknologi adalah pendorong utama produktivitas dan guncangan COVID-19 telah mempercepat penyebaran teknologi digital. Di negara-negara kawasan EAP, perusahaan-perusahaan garis depan (*frontier firms*) cenderung mengadopsi teknologi yang lebih baik dengan lebih cepat daripada di masa lalu, tetapi teknologi tersebut menyebar lebih lambat ke perusahaan-perusahaan lain. Meskipun guncangan COVID telah menimbulkan konvergensi dalam pemanfaatan

teknologi dasar yang langsung berhadapan dengan konsumen seperti e-commerce, guncangan COVID juga berkaitan dengan divergensi dalam pemanfaatan teknologi pendorong produktivitas yang lebih canggih, seperti analisis data.

Penyebaran teknologi yang didorong oleh pandemi juga mengubah struktur perdagangan jasa. Meskipun sektor pariwisata terganggu, perdagangan jasa intensif-data telah meningkat. Investasi yang tidak dapat dibatalkan (*irreversible*) untuk pengiriman data digital yang dilakukan oleh perusahaan maupun konsumen selama masa pandemi secara permanen mengurangi biaya perdagangan internasional jika dibandingkan dengan transaksi domestik. Hasilnya adalah peningkatan peluang perdagangan jasa digital meskipun pemulihan sektor pariwisata dan perjalanan lebih lambat.

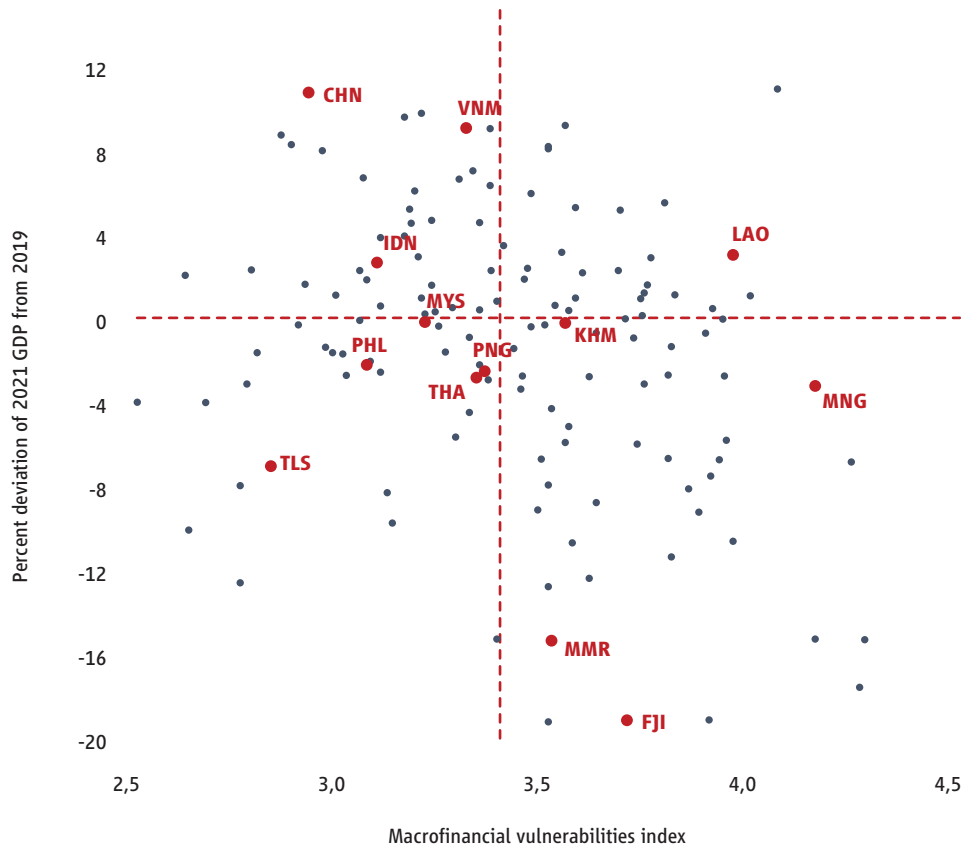
Harga bahan bakar fosil yang tinggi dapat meningkatkan insentif untuk beralih ke energi terbarukan. Dan penerapan teknologi produksi yang ramah lingkungan akan memungkinkan negara-negara EAP mengurangi emisi karbon dan menanggulangi kerawanan energi baru tanpa mengurangi konsumsi atau pertumbuhan secara signifikan. Tetapi tidak semua perubahan yang ada saat ini akan mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan. Harga bahan bakar yang tinggi juga dapat mendorong lebih banyak investasi untuk memproduksi bahan bakar fosil. Dan perang di Ukraina dapat mengurangi ketersediaan input penting dalam produksi barang-barang ramah lingkungan, seperti paladium dan nikel.

Apa yang harus dilakukan?

Kebijakan fiskal. Negara-negara EAP sudah berupaya keras merekonsiliasi dukungan fiskal untuk bantuan keuangan, pemulihan dan pertumbuhan dengan ruang fiskal yang semakin mengecil. Misalnya, pertumbuhan utang – yang mencapai lebih dari 10 poin persentase dari PDB di kebanyakan negara EAP dan lebih dari tiga kali lipat di Fiji – semakin menekankan pentingnya konsolidasi fiskal bahkan ketika pemulihan belum sepenuhnya tercapai (gambar O.3). Selanjutnya, dukungan fiskal yang dilaksanakan oleh badan-badan seperti pemerintah daerah dan badan usaha milik negara berisiko mengurangi kemampuan keuangan mereka. Gejolak baru akan meningkatkan dilema dan menurunkan investasi infrastruktur perdagangan, energi dan penyebaran teknologi – yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan baru dengan meningkatkan kapasitas domestik dan konektivitas internasional.

Ada tiga langkah yang dapat membantu. Pertama, perlindungan sosial yang lebih efisien dapat membebaskan ruang fiskal untuk tujuan yang lain. Negara-negara EAP memberikan perlindungan kepada rumah tangga dari guncangan penghasilan yang berkaitan dengan COVID baru-baru ini melalui peningkatan perlindungan sosial berbasis luas dan dari guncangan harga-harga melalui kombinasi pengendalian harga dan subsidi (atau pengurangan pajak). Kedua tindakan tersebut adalah bentuk bantuan yang layak dalam jangka pendek, tetapi tidak efisien dan tidak berkelanjutan secara fiskal. Bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dan perusahaan-perusahaan, setelah infrastruktur digital tersedia, dapat mengurangi penderitaan akibat gejolak kumulatif tanpa mendistorsi sinyal-sinyal harga atau mensubsidi pihak-pihak yang mampu. Misalnya, bantuan langsung berbasis kemampuan (*means-based*) dapat menghasilkan penurunan angka kemiskinan 2 poin persentase lebih besar daripada bantuan langsung secara universal di suatu negara berpenghasilan menengah secara umum. Kedua, sumber daya publik yang disertai dengan reformasi kebijakan investasi dapat mendorong investasi swasta yang lebih besar dalam pembuatan infrastruktur publik. Yang terakhir, pemerintah perlu merekonsiliasi kebutuhan belanja dengan keterbatasan anggaran yang semakin ketat, melalui komitmen untuk (a) memulihkan disiplin fiskal melalui penerapan (kembali) aturan-aturan fiskal sebagaimana yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan Indonesia pada tahun 2023; dan (b) melakukan reformasi fiskal melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah pemulihan yang obyektif. Misalnya, peraturan perundang-undangan reformasi perpajakan yang baru di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 1,2 persen dari PDB dalam jangka menengah.

Gambar 0.3. Kondisi pemulihan dan kerentanan keuangan makro



Sumber: Estimasi staf Bank Dunia

Catatan: sumbu-y menunjukkan level PDB riil triwulan/tahunan terakhir dibandingkan dengan tahun 2019. Indeks kerentanan keuangan makro terdiri dari empat dimensi: keuangan pemerintah; kebutuhan pembiayaan eksternal; kesehatan sektor keuangan; dan volatilitas ekonomi makro. Skala 1-5 mengacu pada kuintil-kuintil yang dibandingkan dengan sampel dari seluruh pasar berkembang dan perekonomian berkembang.

Kebijakan Makroprudensial. Negara-negara EAP harus berhati-hati terhadap risiko instabilitas keuangan dalam menghadapi pengetatan keuangan di pasar utama. Kebijakan moneter harus tetap mewaspadai tekanan inflasi yang baru, tetapi sekarang dapat terus mendukung pemulihan di sebagian besar negara EAP karena suku bunga riil relatif tinggi dan tingkat inflasi inti relatif rendah. Meskipun bank-bank di sebagian besar negara EAP memiliki tingkat kapitalisasi yang baik dan tingkat kredit bermasalah yang dilaporkan rendah, diagnosis uji tekanan (*stress-testing diagnostics*) dapat membantu mengidentifikasi berbagai kerentanan yang mungkin dapat memburuk di balik selubung toleransi regulasi. Maka, tergantung keadaan, negara-negara harus memastikan bahwa bank-bank yang memiliki utang besar berisiko telah dikapitalisasi secara memadai; melindungi nilai utang dan memperpanjang jatuh tempo utang untuk mengatasi ketidaksesuaian mata uang (*currency mismatch*) dan risiko *rollover*; meningkatkan penyangga likuiditas dan menjamin kredit untuk mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan pembiayaan eksternal. Negara-negara dengan utang eksternal yang tidak berkelanjutan, seperti Laos dan beberapa negara Kepulauan Pasifik, akan mendapatkan manfaat dari pengembangan kerangka resolusi utang internasional yang lebih efektif.

Perdagangan: kebijakan dan infrastruktur. Dengan melaksanakan reformasi perdagangan yang komprehensif, negara-negara EAP akan dapat memanfaatkan perubahan lanskap perdagangan global. Pertama, meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan, dan tidak melakukan pembalasan sebagai respons terhadap kebijakan *reshoring* di luar

negeri, dapat menghasilkan kenaikan penghasilan riil netto sebesar 3 persen. Selain itu, pengendalian global untuk membatasi ekspor dalam menghadapi gejolak harga komoditas dapat mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dan dampak global yang lebih buruk. Kedua, mempertimbangkan hal-hal di luar perdagangan barang, mereformasi pembatasan perdagangan yang masih tinggi di sektor transportasi, komunikasi dan jasa bisnis lain, dapat menekan biaya perdagangan dan meningkatkan produktivitas. Ketiga, dengan mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja domestik, seperti pelatihan ulang dan bantuan penempatan pekerja, sumber daya manusia dapat dipindahkan ke bidang baru yang memiliki keunggulan komparatif sehingga meningkatkan produktivitas dan penghasilan. Yang terakhir, partisipasi dalam perjanjian perdagangan secara mendalam (*deep trade agreement*) dapat memicu reformasi di dalam negeri dan menjamin akses ke pasar luar negeri. Misalnya, partisipasi Tiongkok dalam CPTPP diperkirakan akan meningkatkan perolehan penghasilan global empat kali lipat dari CPTPP (menjadi sekitar \$630 miliar dibandingkan dengan perolehan sekarang sekitar \$150 miliar). Perjanjian secara mendalam dapat mencakup bukan hanya liberalisasi perdagangan melainkan juga kerjasama di bidang regulasi dan koordinasi infrastruktur sehingga semakin memperdalam integrasi ekonomi.

Penyebaran teknologi: kebijakan dan infrastruktur. Penyebaran teknologi yang pesat pada masa pasca COVID dapat meningkatkan produktivitas. Tetapi, pemanfaatan teknologi membutuhkan didampingi reformasi kebijakan. Pertama, persaingan dapat ditingkatkan dengan menghapus hambatan masuk dan keluarnya perusahaan domestik maupun perusahaan luar negeri, serta dengan reformasi lingkungan usaha yang akan memperkuat insentif untuk pengadopsian dan penyebaran teknologi. Kedua, langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis yang relevan serta akses pembiayaan yang dibutuhkan, akan memungkinkan perusahaan-perusahaan menanamkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan mereka. Ketiga, meskipun infrastruktur digital untuk teknologi dasar seringkali sudah tersedia, akses pita lebar (*broadband*) yang tersebar luas, misalnya di provinsi-provinsi Timur Tiongkok, perlu diperluas ke negara-negara seperti Indonesia dan Filipina untuk memfasilitasi penggunaan teknologi yang lebih maju. Terakhir, penghapusan distorsi domestik seperti distorsi yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar fosil dan persyaratan kandungan lokal, dapat mendorong pengadopsian teknologi ramah lingkungan.

Tabel O.1. Prediksi pertumbuhan PDB

	October 2021	April 2021 Forecasts	
	forecast for 2022	Baseline	Low case
East Asia & Pacific	5.4	5.0	4.0
East Asia & Pacific (ex. China)	5.2	4.8	4.2
ASEAN-5	5.2	4.9	4.3
Pacific Island Countries	5.4	2.9	
China	5.4	5.0	4.0
Indonesia	5.2	5.1	4.6
Malaysia	5.8	5.5	4.8
Philippines	5.8	5.7	4.9
Thailand	3.6	2.9	2.6
Vietnam	6.5	5.3	4.0
Cambodia	4.5	4.5	3.8
Lao PDR	4.5	3.8	3.3
Mongolia	5.2	2.5	0.7
Myanmar		1.0	
Papua New Guinea	4.0	4.0	3.0
Timor-Leste	3.7	2.4	
Palau	12.0	7.2	
Fiji	7.8	6.3	
Solomon Islands	4.5	-2.9	
Tuvalu	3.5	3.5	
Marshall Islands	3.5	3.0	
Vanuatu	3.0	2.0	
Kiribati	2.6	1.8	
Tonga	2.6	1.8	
Samoa	1.5	-0.3	
Micronesia, Fed. Sts.	1.0	0.4	
Nauru	0.9	0.9	

Sumber: Bank Dunia; estimasi dan proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Persentase pertumbuhan PDB pada harga pasar. Nilai-nilai untuk tahun 2022–24 adalah prediksi. Nilai-nilai untuk tahun 2021 bagi negara-negara kepulauan kecil adalah estimasi pertumbuhan PDB. ASEAN-5 terdiri dari Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Nilai-nilai untuk Timor-Leste adalah PDB non-migas. Untuk negara-negara berikut ini, nilai-nilai sesuai dengan tahun fiskal: Federasi Mikronesia, Palau, dan Republik Kepulauan Marshall (1 Oktober – 30 September); Nauru, Samoa, dan Tonga (1 Juli–30 Juni). Angka pertumbuhan Myanmar mengacu kepada tahun fiskal dari Oktober sampai September. Mengingat kurangnya data frekuensi tinggi, kami tidak menyusun prediksi skenario terburuk untuk Myanmar, Timor-Leste dan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Tabel O.2. Pertumbuhan ekonomi, virus COVID, perdagangan dan keuangan, dan ruang kebijakan fiskal dan moneter

Negara	Estimasi Pertumbuhan PDB 2022	COVID-19		Commodity dependence		Trade and financial exposure		Macroeconomic policy space	
		Covid-19 cases per million (daily average, Mar 2022)	Restriction index (daily average, Mar 2022)	Net energy export (% of GDP, average 2015-19)	Net food export (grains) (% of GDP, average 2015-19)	Gross goods & services export (% of GDP, average 2015-19)	External financing needs (% of GDP, 2022 est.)	General government debt (% of GDP, 2021)	CPI inflation (Feb 2022 or latest)
China	5,0	1	64	-1,4	0,0	20	6	45	0,8
Indonesia	5,1	67	61	1,4	-0,3	19	9	41	2,1
Malaysia	5,5	818	54	3,6	-0,4	78	29	63	2,2
Philippines	5,7	5	78	-3,1	-0,6	30	8	55	3,0
Thailand	2,9	346	48	-3,5	0,9	66	11	58	5,3
Vietnam	5,3	2267	65	-2,9	0,0	99	5	45	1,4
Cambodia	4,5	13	23	-9,0	1,3	72	36	35	3,7
Lao PDR	3,8	84	82	-4,7	0,2	34	20	78	7,3
Mongolia	2,5	124	12	10,0	-0,3	57	43	80	14,3
Myanmar	1,0	18	71	2,4	0,7	29	3	57	9,9
PNG	4,0	1	51	14,7	-0,8	42	-9	52	5,7
Timor-Leste	2,4	4	36	0,8	-1,4	7	18	25	5,4
Fiji	6,3	20	65	-5,6	-1,1	45	14	86	2,7
Kiribati	1,8	55	76	-7,7	-2,8	11		21	3,0
Marshall Is.	3,0	0			-1,0	29		14	
Micronesia	0,4	0		-9,2	-1,1	30		15	2,5
Nauru	0,9	0		-26,2	-0,1	32		28	2,0
Palau	7,2	463		-4,7	-0,3	54			3,0
Samoa	-0,3	60		-4,6	-0,3	35	10	50	8,5
Solomon Is.	-2,9	204	87	-3,7	-1,9	40	21	21	3,3
Tonga	-1,6	1460	87	-6,7	0,0	20	12	46	6,0
Tuvalu	3,5	0		-22,1	-0,7	20		6	2,8
Vanuatu	2,0	159	41	-4,1	-0,6	44	14	28	4,5

Sumber: UN Comtrade; Fitch Solutions; Haver Analytics; International Monetary Fund; Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT), WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard; World Development Indicators; Bank Dunia.

Catatan: Indeks pembatasan (restriction index) adalah ukuran kebijakan pembatasan pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19, diskala ulang dari 0 sampai 100 (100 = paling ketat). Untuk negara-negara yang belum mempunyai data Maret 2022, data Februari 2022 digunakan. Ekspor energi netto mencakup bahan bakar mineral, minyak, dan lilin (kode HS 27) dikurangi energi listrik. Ekspor pangan netto (biji-bijian) mencakup sereal dan biji-bijian (kode HS 10). Inflasi CPI (indeks harga konsumen) Kiribati, Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu memperlihatkan estimasi akhir periode 2021. Skala warna menggambarkan kuintil dibandingkan dengan kelompok pasar berkembang dan perekonomian berkembang, dengan warna merah yang menandakan eksposur terburuk dan hijau adalah eksposur terendah. Utang pemerintah negara-negara kepulauan kecil secara umum tidak diskala menurut warna karena toleransi utang negara-negara kepulauan kecil masih lebih rendah daripada negara-negara EMDE (emerging market and developing economies; perekonomian dan pasar berkembang) yang lebih besar